

PKn SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI-MORAL DAN TANTANGANNYA

Oleh: Nur Salim, Staf Jurusan PPKn.

ABSTRAK

Upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa sudah berlangsung sejak masa sebelum kemerdekaan dengan berbagai cara dan strategi yang digunakan pada saat itu yang tentunya menyesuaikan dengan kemampuan daya pikir dan kondisi. Setelah merdeka upaya untuk mencetak warga negara yang baik (*good citizenship*) semakin dianggap penting, terbukti dengan munculnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Meskipun nama dan materinya mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan pemerintahannya.

Hal tersebut terjadi karena PKn adalah program dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Tentu semuanya tujuannya adalah baik yakni untuk mencetak warga negara yang baik. Mencetak warga negara muda yang baik berarti mengajarkan dan mendidik nilai-nilai kepada anak. Mengajar dan mendidik nilai berarti membentuk moralitas kepada anak didik.

Di era globalisasi ini, ada sejumlah tantangan yang dihadapi guru dalam membentuk warga negara yang baik. Tantangan itu bukan untuk kita hindari namun kita hadapi dan diselesaikan. Begitu banyaknya tantangan yang muncul, rasanya sudah saatnya kita merevitalisasi kembali materi pembelajaran PKn yang harusnya lebih mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila yang saat ini makin jauh dari kehidupan bangsa dan terutama anak-anak bangsa. Kehadiran PPKn dalam kurikulum 2013, semoga bisa menjawab sejumlah tantangan “*character lost*” pada anak didik kita.

A. Pendahuluan

Negara adalah organisasi bangsa yang diperlukan untuk mencapai cita-cita, tujuan dan kepentingan bersama agar apa yang diinginkan tercapai. Dari sini akhirnya munculah hubungan timbal balik atau simbiose mutualisme, dalam arti negara membutuhkan warga negara yang baik dan warga negara membutuhkan negara kuat. Tentu yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah warga negara yang baik karena dengan SDM yang baik negara bisa dikelola dengan maksimal. Kemudian timbulah upaya untuk mencetak *Good Citizenship yang digarap melalui pendidikan moral atau akhlaq*.

Jadi pendidikan moral adalah program pemerintah yang ada di setiap negara sehingga sifatnya *universal*. Hanya materi, model dan teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Hal ini terjadi karena adanya sistem nilai, keyakinan, kepercayaan dan ideologi yang berbeda-beda. Pendidikan moral di Indonesia dilaksanakan melalui mata pelajaran *PKn/PPKn*.

B.PKn Sebagai Pendidikan Nilai–Moral Dan Tantangannya.

I.Hakikat Pendidikan Moral.

- Pendidikan moral di Indonesia memiliki tujuan untuk menanamkan **seperangkat nilai** yang menjadi ciri manusia Indonesia seutuhnya, yang menyelaraskan nilai–nilai agama dan kebudayaan (ideologi, iptek, dll).
- Pendidikan moral adalah sebuah program (sekolah/luar sekolah) yang **mengorganisasikan dan menyederhanakan** sumber moral yang disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan.
- Isi pendidikan moral (Pancasila) pada dasarnya bersumber dan bertujuan untuk menumbuhkan *public–culture* (budaya publik), namun bahan–bahannya tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Isi pendidikan moral hendaknya disusun dalam **bentuk generalisasi**, agar memungkinkan seseorang mengkaji kebenaran generalisasi tersebut.
- Metode **latihan moral** (*moral training*), **pengkondisian moral** (*moral conditioning*) perlu ditonjolkan.
- Penambahan berbagai bahan ilmu pengetahuan dan masalah–masalah sosial akan memperkaya pendidikan moral, serta mendorong terjadinya **penalaran moral** (*moral reasoning*) dan pengembangan **moral kognitif** (*cognitive moral development*)
- Keberhasilan pendidikan moral merupakan upaya bersama. Oleh karena itu pengertian *hidden curriculum* perlu dikembangkan agar semua program di sekolah dan masyarakat memberikan sumbangan untuk keberhasilan pendidikan moral

II.Dinamika Pendidikan Moral di Indonesia

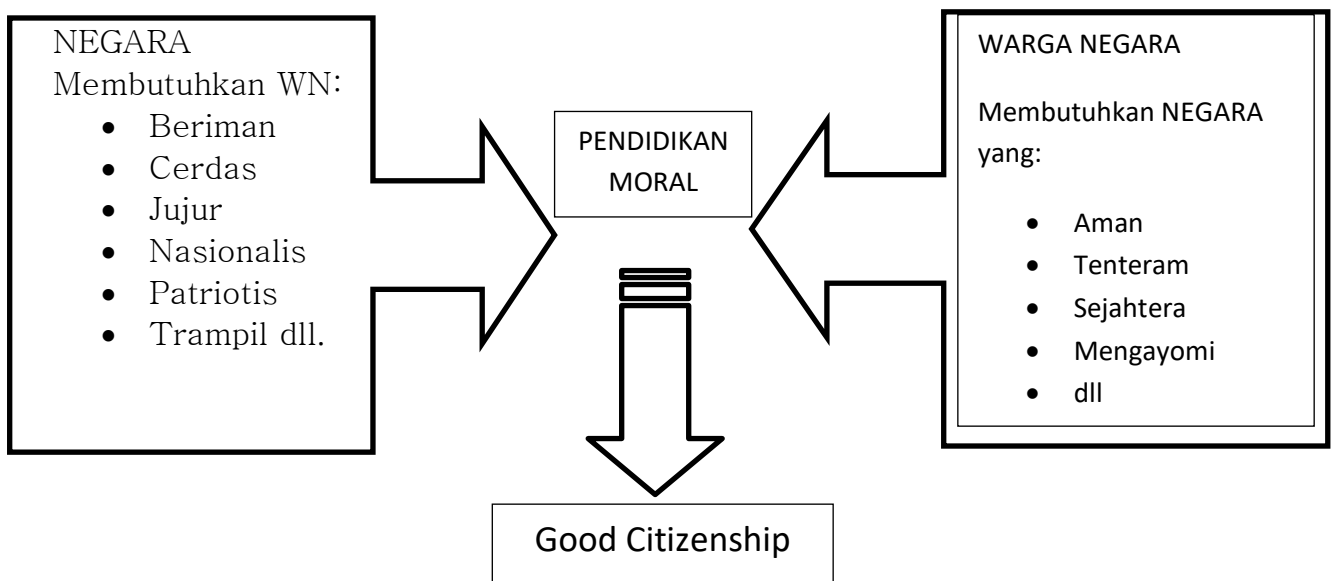
Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan nilai diwarnai oleh perkembangan kehidupan sosial politik bangsa dan negara. Maka tak heran jika Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Moral Bangsa) ini mengalami tantangan dan dinamika (Bambang Sunarko, 2011:17). Perkembangan Pkn sebagai pendidikan nilai–moral tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

A.Sebelum merdeka: ada model Pendidikan Padepokan, Pendidikan Pesantren dan Pendidikan dalam Keluarga (berupa pesan dan nasehat). Disamping itu bisa juga melalui cerita pewayangan, cerita legenda dan fabel.

B.Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, berarti Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak mengatur rumah tangga negaranya sendiri termasuk mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi bangsanya. Berikut adalah perkembangan Pendidikan moral di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

- ❑ Tahun 1945: Pendidikan Budi Pekerti
- ❑ Tahun 1956: muncul nama *Civics*
- ❑ Tahun 1962: diganti Kewarganegaraan
- ❑ Tahun 1968: Pendidikan Kewarganegaraan
- ❑ Kurikulum 1975/1976: PMP
- ❑ Kurikulum 1984: nama PMP tetap dipertahankan.
- ❑ Kurikulum 1994: diganti PPKn
- ❑ Tahun 1999: nama PPKn tetap berlaku dengan perubahan materi yang nampak dengan adanya buku suplemen.
- ❑ Kurikulum 2004: muncul nama baru PPKn Dan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pendidikan Sosial (PKPS).
- ❑ Kurikulum 2006: diganti PKn.
- ❑ Kurikulum 2013: Muncul nama PPKn lagi.
- ❑ Pendidikan Moral pada prinsipnya adalah program (dari Pemerintah) untuk membentuk karakter bangsa (**nation and character building**), yakni membentuk warga negara Indonesia yang memahami hak dan kewajibannya serta bisa mengimplementasikan dalam sikap dan perbuatan yang positif.
- ❑ Pendidikan Moral secara totalitas bukanlah ilmu, meskipun untuk mempelajarinya membutuhkan pendekatan disiplin Ilmu Pendidikan, Ilmu Etika, Ilmu Politik, Ilmu Hukum dan disiplin Ilmu Sosial.

III. RASIONAL PKn SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI/MORAL DI SEKOLAH



PRODUK YANG DIHARAPKAN DARI PKn SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI:

Anak bisa berkembang menjadi warga negara yang baik (memahami hak dan kewajibannya dan mampu mengimplementasikan ke dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara). Sehingga anak bisa menjadi warga negara yang cerdas (civic intelligence), bertanggungjawab (civic responsibility) dan mampu berpartisipasi secara positif dalam kehidupan (civic participation) yang berdasarkan Pancasila (Udin S. Winataputra, 2008).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral disekolah mengacu pada tingkatan jenjang sekolah anak. Semakin rendah jenjang pendidikan anak maka aspek moral ethisnya akan semakin besar dan semakin tinggi jenjang pendidikan anak maka aspek yuridis konstitusionalnya akan semakin tinggi. Walaupun demikian materi yang mengandung aspek yuridis konstitusional harus senantiasa mengandung muatan moral ethis juga.

Tugas guru dalam pendidikan moral menurut Thomas Lickona dalam Suryanto (2012:5)

- ♪ Menjadi model bagi peserta didik
- ♪ Mewujudkan sekolah sebagai masyarakat bermoral
- ♪ Mempraktekkan disiplin moral dalam perilaku
- ♪ Menciptakan situasi demokratis di kelas
- ♪ Mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum
- ♪ Membangun budaya kerja sama (cooperative)
- ♪ Menumbuhkan kesadaran berkarya
- ♪ Mengembangkan refleksi moral
- ♪ Mengajarkan resolusi konflik

IV. Tantangan PKn Sebagai Pendidikan Nilai-Moral.

PKn sebagai pendidikan nilai-moral sudah pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, mendidik anak untuk menjadi warga negara yang baik yang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun tantangan kita sebagai Guru sangat besar, baik itu yang berkaitan dengan anak didik sendiri, lingkungan keluarga, masyarakat dan praktek kehidupan bernegara yang sering kali amat bertentangan dengan nilai yang kita ajarkan.

1. Moralitas birokrat yang tidak jujur, tidak berakhlak, mementingkan diri dan kelompoknya. Siapa yang menjadi figur teladan anak didik? Jawab!

KETELADANAN GURU sangat dibutuhkan, hal ini terkait dgn kompetensi yg hrs dimiliki Guru yakni kompetensi pedagogis, *kepribadian* sosial dn profesional.

-Pengaruh keteladanan:

- SD = 90%
- SMP = 70%

SMA = 60%

S1 = 40%

2. Suburnya Praktek Korupsi, kolusi dan Nepotisme dlm pemerintahan...
*Politikus Bilang : “Katakan Tidak **Pada** Korupsi!” Eehh Ternyata “Katakan Tidak **Padahal** Korupsi”.*
3. Menurunnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan.
Ditandai dengan masih kuatnya demokrasi pragmatisme dalam masyarakat dan rata-rata angka partisipasi dalam kehidupan politik sekitar 70%, sedangkan yang sekitar 30% lebih memilih apatis atau acuh.
4. Merosotnya nilai-nilai *toleransi* dalam masyarakat.
Mudahnya terjadi *bentrokan* antara pemeluk agama seperti di Ambon, Poso. Juga mudahnya terjadi *konflik* dalam intern agama seperti antara Kelompok Syiah dan Suni di Sampang, Penyikapan terhadap kelompok Ahmadiyah, konflik horisontal di Mesuji Lampung dan Makassar beberapa hari yang lalu. Padahal pada tahun 1990 an ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia, kita dipuji sebagai negara yang memiliki tingkat toleransi paling tinggi di dunia.
5. Melemahnya nilai kejujuran, kesopanan, tolong-menolong.
6. Praktek Politik dan Ekonomi yg mengarah ke Ideologi *Liberal*.
7. Melemahnya nilai-nilai luhur (tradisi) dlm Keluarga dan Masyarakat.
8. DI KALANGAN ANAK DIDIK:
 - A. BERKURANGNYA NILAI KESOPANAN.
 - B. KUATNYA PENGARUH NEGATIF DARI GLOBALISASI.
 - C. ANCAMAN “CHARACTER LOST”.
 - D. TAWURAN ANTAR PELAJAR (KELAS VI SD – XII SMA).
9. Tidak ada lembaga yang mengurus Ideologi Negara.
 - Pada masa pemerintahan orde baru ada Lembaga BP 7: Badan Pengawas dan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila.
 - Dlm Kongres Pancasila ke 3 thn 2011: usul “DEWAN PEMASYARAKATAN PANCASILA DAN UUD 1945”. Namun realisasinya juga belum nampak sampai saat ini.
 - Pemasyarakatan 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) oleh MPR Dan Pelaksanaan Pendidikan Karakter terintegrasi Belum Berjalan Efektif.
10. Materi / Kurikulum PKn yang *dinamis* terutama yang menyangkut aspek Yuridi Konstitusional.
 - Misalnya materi Tentang: Memahami Sistem Pemerintahan RI (Pemilu, Pilkada, Fungsi dan Tugas Lembaga Negara). TERHADAP MATERI SEPERTI ITU, APA YANG HARUS DILAKUKAN GURU?
11. Ganti Rezim/Pemerintahan selalu di ikuti dengan perubahan materi dan nama (Orde Lama- Orde Baru-Orde Reformasi). Sepuluh kali mengalami

pergantian nama karena menyesuaikan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa.

12. Materi PKn bersifat Normatif karena PKn adalah Pendidikan Nilai. Jika mengandalkan ceramah, membosankan... SOLUSINYA APA BAGI GURU DALAM MELAKUKAN PROSES PEMBELAJARAN AGAR TIDAK MEMBOSANKAN? Tentu guru harus pintar menerapkan model pembelajaran berbasis PAIKEM dan mahir menerapkan metode ceramah bervariasi, diskusi, role playing, studi kasus, problem solving dll. Disamping itu guru siap menjadi *model* bagi anak didiknya.
13. Penilaian yang dilakukan oleh Guru sering hanya bertumpu pada aspek *koqnitif* saja. Produknya adalah anak *pintar* mengerjakan *soal-soal* PKn, namun sikap dan perilakunya tidak linier. *Contoh*: Anak tahu apa artinya Hemat Dan Jujur namun dalam kesehariannya justru senang hidup boros dan sering menipu.
14. Menurunnya nilai-nilai Kebangsaan/Nasionalisme.
WASPADALAH ANCAMAN KEBANGSAAN!
 - a. Kerusakan dan kekerasan dengan basis SARA.
 - 1). Kerusakan Sambas Kalbar
 - 2). Ambon dan Poso
 - 3). Di Sampang Kelompok Suni dan Syiah dll.
 - b. Gerakan Sparatisme yaitu memisahkan diri dari NKRI.
 - 1). OPM
 - 2). RMS
 - 3). Sisa GAM.
 - c. Gerakan radikal kanan berbasis agama.
 - 1). Mengamalkan sebuah ajaran agama secara kaffah.
 - 2). Memusuhi negara barat.
 - 3). Bergerilya yaitu melakukan gerakan dibawah tanah.
Contoh: NII (DI - TII).
Sasaran: Keluarga, Tempat ibadah, Lembaga Pendidikan seperti Unmuh Malang dan UIN Jakarta beberapa tahun yang lalu.
Srtategi: "Brain Washing" Pencucian otak.
Tujuannya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia.
 - d. Terorisme yaitu menebar kekerasan untuk mencapai tujuan.
 - 1). Tidak menerima kelompok lain.
 - 2). Berani mati (Mati syahid)
 - 3). Bergerak di bawah tanah.
Sasaran dari gerakan terorisme ini adalah tempat hiburan, keramaian, hotel asing, tempat ibadah agama lain bahkan bom masjid Polres Cirebon beberapa waktu lalu. Penembakan terhadap aparat keamanan di Solo, bom Depok dll.
Tujuan gerakan ini adalah Negara Islam. Bedanya kalau gerakan radikal sebatas pemikiran dan ideologi namun kalau teroris berupa tindakan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

PKn sebagai Pendidikan nilai-moral bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa agar memiliki jati diri Indonesia yakni jati diri yang berdasarkan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Kepribadian yang dibentuk adalah produk manusia Indonesia yang sehat karakter berfikirnya, sehat karakter hatinya, sehat karakter perasaannya dan sehat karakter tingkahluaknya.

Mengajarkan nilai-moral kepada anak didik adalah tugas yang mulia karena bersentuhan dengan upaya kita untuk membentuk generasi penerus yang handal kepribadiannya dan berbudi luhur. Untuk itu keteladanan guru juga sangat dibutuhkan disamping peran keluarga, figur tokoh-tokoh formal maupun non formal.

Mengajarkan nilai-moralitas kepada anak didik tidak hanya menyampaikan aspek pengetahuannya saja, namun lebih kepada bagaimana guru mampu membiasakan nilai-nilai tersebut ke dalam sikap dan perilaku anak didik. Seperti halnya jika guru mengajarkan nilai Jujur dengan berupaya mendirikan Kantin Kejujuran, Nilai Kesopanan dengan memberikan waktu 1 hari dalam seminggu agar anak menggunakan bahasa Jawa. Mengajarkan nilai Kebangsaan dengan membiasakan upacara tertib setiap hari Senin (menghormat bendera, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, membaca teks Pancasila dan UUD 1945). Mengajarkan nilai Toleransi dengan cara memberi kesempatan kepada siswa yang beragama lain untuk memberi ucapan Selamat Hari Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunarko, Bambang (2011). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Suryanto (2012). *Pengembangan Profesionalisme Guru yang Berkarakter*. Bahan PLPG Rayon 143 Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Winataputra, Udin S. (2008). *Pembelajaran PKn di SD*. Universitas Terbuka.

**PKn SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI-MORAL DAN
TANTANGANNYA**

**Makalah Disampaikan Dalam Seminar Yang Di Selenggarakan
Oleh HIMAPRODI PPKn Dalam Rangka Dies Natalis UNP Ke
37.**

Minggu, 31 Maret 2013

Oleh:

Nur Salim

Dosen Jurusan PPKn FKIP UNP Kediri

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**